

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Mertokusumo, Sudikno. Bab-bab tentang penegakan hukum. Citra Aditya Bhakti, Jakarta: 1993

H.D. Stout. *De Betekenissen van de Wet*. Tjeenk Willink. Zwolle: 1994.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: 2000.

N.E. Algra et. al. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Belanda Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta: 1983.

Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 1980.

Moeljatno (1). *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta: 1985.

R. Subekti dan R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta: 1997.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004.

Budiono, Herlin. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.

F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta, Jakarta: 1995. Disalin dari Leslie Lipson, *The Great Issues of Politics*, Bab III, h. 41

Iver, Mac. *Negara Modern*, terjemahan Moertono. Aksara Baru, Jakarta: 1988.

Ardiyansah, Sandra. *perlindungan hukum untuk TKI*. UNY, Yogyakarta: 2017.

Novalita, Tita. *Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan*. Djambatan, Jakarta: 2016.

Yolanda,Nina. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. UNY , Yogyakarta: 2020.

Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja

Indonesia oleh Akademi Imigrasi

Thoha, Muhammad. *Perlindungan hukum TKI di Luar Negeri*. Pattiha, Jakarta: 2014.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2011:49)

2. Perundang-undangan

Pasal 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pasal 1(2), pasal 1(5), pasal 1(4), pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 26, pasal 29, pasal 77, pasal 94 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

Pasal 11, pasal 12-15 Undang-undang nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah

Pasal 1, pasal 1(1), pasal 3, pasal 6 huruf (g), pasal 7, pasal 21, pasal 24, pasal 27, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 46 (1) dan (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 48(2), pasal 51(1), pasal 54(1) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 6 undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

3. Media Sosial/Internet

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/> di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 15.00

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/499066/pemerintah-sedang-susun-peraturan-turunan-uu-tki-yang-baru> di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 15.30

<https://hi.umy.ac.id/tenaga-kerja-tidak-terdidik-penyebab-utama-permasalahan-tki-di-luar-negeri/> di akses pada tanggal 12 Januari 2022 jam 16.00

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/18/pf87yw423-faktor-ekonomi-penyebab-utama-warga-jadi-tki> di akses pada tanggal 15 oktober 2021